

20. PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis PD Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Proses penyusunan Renstra tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;

- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. Analisis gambaran pelayanan;
 - b. Analisis permasalahan;
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Analisis isu strategis;
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal rpjmd;
 - f. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah; dan
 - g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
 3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

Dalam pelaksanaannya, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan. Perubahan pertama disusun dengan menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, perubahan Perwali Tupoksi dan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ. Terbitnya aturan baru tersebut menyebabkan Perangkat daerah melakukan perubahan dilevel kegiatan dan sub kegiatan baik pada nomenklatur, indikator, target dan substansinya. Perubahan kedua dilakukan untuk menyesuaikan sub kegiatan dan indikatornya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR

Tahun Anggaran 2022, BHHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 - 2030(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026;
20. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021-2026 untuk menyesuaikan sub kegiatan dan indikatornya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
2. Menyelaraskan rencana strategis kotadengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis perangkat daerah.
3. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama 5 (lima) tahun yang merupakan pedoman dalam pencapaian visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar melalui sumber pembiayaan APBD.
4. Sebagai instrumen pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.
5. Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kota Blitar pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

	2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
	3.3.	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait
	3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN,
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BAB VII		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- f. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan operasional di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang perindustrian dan bidang perdagangan di tingkat kota ;
- d. pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- e. penyelenggaraan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

- f. pengusulan penataan organisasi, kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- g. pengusulan rancangan peraturan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- h. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota;
- i. penyelenggaraan promosi produk industri kota;
- j. fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota;
- k. sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
- l. fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota;
- m. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota;
- n. fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota;
- o. pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota;
- p. pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi;
- q. pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan di wilayah kota;
- r. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota;
- s. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%;
- t. pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota;
- u. pembinaan dan pengawasan, pemberian rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
- v. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota;
- w. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota;
- x. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota;
- y. sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
- z. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
- å. pembinaan dan pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota;
- ä. pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
- ö. pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);

- aa. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- bb. pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota;
- cc. koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota;
- dd. sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota;
- ee. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
- ff. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota;
- gg. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
- hh. fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota;
- ii. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
- jj. pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
- kk. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota;
- ll. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
- mm. pembinaan operasional reparatur UTTP.
- nn. penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
- oo. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- pp. sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk.
- qq. penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir(API);
- rr. pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- ss. pemberian rekomendasi Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kota;
- tt. pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
- uu. pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota;
- vv. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kota;
- zz. pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- aaa. peremajaan data dalam bidang perdagangan dan bidang perindustrian untuk tingkat kota ;
- bbb. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

Kepala Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :

- 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar

Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan

UPT Metrologi Legal; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUTRIAN



PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota .

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- j. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- n. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- p. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- r. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- s. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

- t. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- u. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- v. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- w. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- x. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- y. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- z. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perdagangan dan perindustrian;
- aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang perdagangan dan perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- bb. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan Perdagangan menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;
- c. Fasilitasi pengembangan ekspor untuk pelaku usaha tingkat kota;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengelola sarana distribusi;
- e. Fasilitasi rekomendasi pemberian perijinan pendaftaran perusahaan;
- f. Pembinaan pelaku usaha perdagangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan sarana distribusi perdagangan;

- h. Pembinaan pelaku usaha (pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko, eksportir dan importir);
- i. Fasilitasi pengawasan perijinan bagi pelaku usaha perdagangan;
- j. Fasilitasi pembinaan manajemen, pemasaran, pengelolaan usaha, modal, dan sarana usahakepada pedagang non formal /pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dan PKL;
- k. fasilitasi bantuan modal, dan sarana usahakepada pedagang non formal /pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dan PKL;
- l. Fasilitasi pengembangan kerja sama dan PKL, pedagang kecil, menengah, besar dalam rangka kemitraan;
- m. Penyiapan pembinaan perdagangan dalam rangka promosi produksi dalam negeri;
- n. Fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar;
- o. Fasilitasi pemberian pertimbangan teknis perijinan di lingkungan pasar;
- p. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah di bidang pengelolaan pasar
- q. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi terkait bidang pengelolaan pasar;
- r. pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pengelolaan pasar
- s. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;
- t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan

- (1) Bidang Pengawasan perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan;

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan menjalankan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan perindustrian dan perdagangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. Penyusunan program/kegiatan di bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- e. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota;
- f. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota;
- g. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
- h. pembinaan dan pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota;

- i. pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
- j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- k. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
- l. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota;
- m. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi bidang perindustrian;
- n. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pada usaha perindustrian;
- o. Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kota;
- p. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Kota;
- q. Penyelenggaraan promosi produk industry kota;
- r. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha indutri dan tanda daftar industri;
- s. Pelaksanaan fasilitasi penerapan standart kompetensi SDM industri;
- t. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan bidang energy dan migas;
- u. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengawasan Perindustrian dan Perdagangan;
- v. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pada bidang perindustrian dan aneka usaha industri;
- w. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pada bidang urusan industri dan aneka usaha industri;
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengawasan perindustrian dan perdagangan;
- y. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai peraturan perundangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tersebut di atas, didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan staf pelaksana sesuai stuktur yang telah ditetapkan, sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sebagaimana terdapat pada tabel terlampir

Tabel 2.2.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki – Laki	47
Perempuan	10
Total	57

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan

fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
Pembina (IV/a)	3	0	3
Penata Tk. I (III/d)	3	4	7
Penata (III/c)	0	1	1
Penata Muda Tk.I (III/b)	1	0	1
Penata Muda (III/a)	0	1	1
Pengatur Tk I (II/d)	20	1	21
Pengatur (II/c)	1	0	1
Pengatur Muda Tk.I (II/b)	10	0	10
Pengatur Muda (II/a)	2	0	2
Juru Tk I (I/d)	5	0	5
Juru (I/c)	1	0	1
PTT	3	0	3
Jumlah	50	7	57

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S.2	2	0	2
S.1	7	5	12
D III	1	1	2
SLTA	9	1	10
SMK	16	0	16
SLTP	11	0	11
SD	4	0	4
Total	50	7	57

Sumber data : Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini terdapat dalam tabel terlampir.

Tabel 2.2.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Gedung	2 Unit
2	Kendaraan Dinas	
	Roda Empat	4 Unit
	Roda Dua	8 Unit
3	Mesin Komputer	10 Unit
4	Pesawat Telepon	7 Unit
5	Listrik	1 Unit
6	PDAM	1 Unit
7	Kamera Foto	8 Unit
8	Meja Tamu	5 Unit
9	Jam Dinding	9 Unit
10	Brankas	2 Unit
11	Wireless	2 Unit
12	Filling Kabinet	12 Unit
13	Almari Kayu	11 Unit
14	Meja Tamu	28 Unit
15	Kursi Putar	19 Unit
16	Kursi Rapat	50 Unit
17	Kipas Angin	12 Unit
18	AC	9 Unit
19	Laptop	12 Unit
20	PABX	1 Unit
21	Printer	14 Unit
22	Genset	1 Unit
23	Mesin Pompa Air	1 Unit
24	Meja Kursi	10 Unit
25	Flasdisk	10 Unit
26	CCTV	8 buah Kamera 2 Monitor
27	Almari Arsip (Besi)	3 Buah
28	TV	2 Buah
29	Kulkas	1 Buah
30	Korden	50 Meter
31	Almari Arsip/Box File	2 buah
32	Kursi Kerja	16 Buah
33	Kursi Rapat	20 Buah
34	Kursi Tunggu	1 Buah
35	Peralatan Ketipung Dangdut	
	Bor Tangan (Electrical Drill)	4 Buah
	Bor Duduk (Breach Drilling Drill)	2 Unit
	Spray Gun	4 Buah
	Air Compresor	2 Unit
	Investor	2 Buah
	Gasoline Generator	2 Unit
	Dinamo (Elektrik Motor)	4 Buah
	Tatah Ukir	4 Set
36	Peralatan Konveksi Kaos	
	Mesin Jahit High Speed	4 Set
	Mesin Obras 5 Benang	4 Set

	Mesin Overdeck	4 Set
	Gunting Listrik	4 Unit
37	Peralatan Batik Cap dan Tulis	
	Meja Cap Lengkap	6 Unit
	Canting Cap 20 Motif	20 Buah
	Loyang Cap	6 Buah
	Kompor Gas Kecil Lengkap	6 Set
	Panci Piknik Listrik	24 Set
	Timbangan Gram Manual	6 Set
	Bak Bilas Plastik	48 Buah
	Pentangan Kayu	24 Buah
	Meja Kompor	6 Buah
	Dandang	4 Buah
	Wajan	24 Buah
	Kompor Gas Besar Lengkap	2 Set

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016-2021 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA 2016	REALISASI 2016	RASIO CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	
1	TUJUAN : Meningkatnya Kontribusi Perindustrian terhadap Perekonomian	Prosentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Nilai PDRB sektor perdagangan tahun n - Nilai PDRB sektor perdagangan tahun (n-1) / Nilai PDRB sektor perdagangan tahun (n-1) x 100%	3,6 %	12,96%	360 %
	SASARAN : Meningkatnya Perkembangan Industri Kecil Menengah terlatih	Prosentase IKM terlatih terhadap Jumlah IKM terdaftar	Jumlah IKM terlatih dibagi Jumlah Total IKM terdaftar x 100 %	9,63%	9,76%	101,4 %
	PROGRAM : PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Prosentase Jumlah Industri Kecil menengah yang berkembang	{(Jumlah IKM tahun n - Jumlah IKM tahun (n-1))/Jumlah IKM tahun (n-1)} x 100 %	3,60%		95,65%
2	TUJUAN : Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap perekonomian	Prosentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Nilai PDRB sektor industri tahun n - Nilai PDRB sektor industri tahun (n - 1) / Nilai PDRB sektor industri tahun (n - 1) x 100%	5,7 %	9,92%	174 %
3	SASARAN : Meningkatnya kesadaran pelaku Usaha yang wajib tera/tera ulang	Prosentase kesadaran pelaku usaha yang wajib melakukan tera/tera ulang	Jumlah pelaku usaha yang melakukan tera/tera ulang Tahun (n) - Jumlah pelaku usaha yang melakukan tera/tera ulang tahun (n-1) dibagi Jumlah pelaku usaha yang melakukan tera/tera ulang tahun (n-1) x 100 %	37,72%	-2,40%	-106,36 %
	PROGRAM : PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase jumlah pemilik UTTP yang dibina	(Jumlah Alat UTTP yang ditera/ Jumlah Alat UTTP yang ada) x 100%	37,70%		
4	SASARAN : Meningkatnya penataan Pedagang Kakilima	Prosentase Pedagang Kakilima yang memiliki Ijin SIPTU	Jumlah pedagang kakilima (PKL) yang memiliki ijin tahun (n) dibagi Jumlah seluruh Pedagang Kakilima (PKL) tahun (n) x 100 %	28%	8,7 %	31.07 %
	PROGRAM : PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Prosentase PKL dan asongan yang dibina		2,56%		

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA 2016	REALISASI 2016	RASIO CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	
	PROGRAM : PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase pelanggaran barang kena cukai ilegal	(Jumlah Pelanggar barang kena cukai ilegal/ Jumlah Pengusaha yang diperiksa) x 100 %	0%		
5	SASARAN : Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok	Stabilitas harga bahan pokok	Harga rata-rata Bahan Pokok dalam Tahun (n) - Harga Bahan Pokok awal Tahun dibagi Harga Bahan Pokok Tahun (n) X 100 %	<50 %	<50 %	100 %
6	TUJUAN : Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)	Jumlah nilai rupiah modal yang diinvestasikan oleh pelaku usaha	160 M	166,8 M	104,25 %
	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase peningkatan jumlah harga bahan pokok		13,3%		
7	SASARAN : Meningkatnya Investasi PMDN	Prosentase peningkatan realisasi nilai investasi	Jumlah nilai investasi tahun (n) - Jumlah nilai investasi tahun (n-1) dibagi Jumlah nilai investasi tahun (n-1) X 100 %	0,50%	4,83%	966 %
	PROGRAM : PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase peningkatan kerjasama investasi		0,50%		
8	SASARAN : Meningkatnya produk hasil IKM yang memiliki sertifikasi HKI	Prosentase peningkatan jumlah produk IKM yang bersertifikasi HKI	Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi HKI tahun(n) - Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi HKI tahun (n-1) dibagi Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi HKI tahun (n-1) x 100 %	30%	21,4 %	71.3 %

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2017 – 2018

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		RASIO CAPAIAN	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7			
1	TUJUAN : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	{(nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n - nilai PDRB sektor Perdagangan tahun (n-1))/ Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun (n-1)} x 100 %	11,00 %	11,20 %	10,05 %	11,15 %	91,36 %	99,55 %

	Perdagangan dan Industri								
		Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	{(nilai PDRB Sektor Industri tahun n - nilai PDRB sektor Industri tahun (n-1))/ Nilai PDRB Sektor Industri Tahun (n-1)} x 100 %	11,5 %	11,55 %	10 %	10,01 %	86,96 %	86,67 %
	Program : Peningkatan Sarana Disribusi Perdagangan	Presentase Sarana perdagangan dalam kondisi baik	{Jumlah sarpras perdagangan dalam kondisi baik/ Jumlah sarpras perdagangan yang ada} x 100 %	5 %	5,2 %	5%	8,9%	100 %	171,15%
2	SASARAN : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	{(Jumlah usaha perdagangan tahun n - Jumlah usaha tahun (n-1))/ Jumlah usaha tahun (n-1)} x 100 %	5%	5,10%	5 %	2,8 %	100 %	54,90 %
3	SASARAN : Meningkatnya pengawasan Alat UTTP	Persentase jumlah alat UTTP bertanda tera sah	(Jumlah alat UTTP bertanda tera sah / Jumlah alat UTTP yang ada) x 100 %	11%	30%	0,95 %	0,79 %	8,64 %	2,63 %
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	(Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah / Jumlah Alat UTTP yang ada) x 100%	11 %	30 %	0.95 %	0,79%	8,7 %	2,63 %1
4	SASARAN : Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	{(Jumlah nilai produksi industri tahun n - Jumlah nilai produksi industri tahun (n-1))/ Jumlah nilai produksi industri tahun (n-1)} x 100 %	0,25	0,3%	5,87 %	2,33 %	23,48 %	776,67 %

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2019 – 2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			RASIO CAPAIAN		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TUJUAN : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	{(nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n – nilai PDRB sektor Perdagangan	11,30 %	11,40 %	11,50 %	7,69	-5,7		68,1	-150	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			RASIO CAPAIAN		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perdagangan dan Industri		tahun (n-1))/ Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun (n-1)} x 100 %									
		Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perindustrian	{{nilai PDRB Sektor Industri tahun n – nilai PDRB sektor Industri tahun (n-1))/ Nilai PDRB Sektor Industri Tahun (n-1)} x 100 %	11,6 %	11,65 %	11,7 %	8,45	-0,81		72,5	-106,9	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	{{Jumlah IKM tahun n - Jumlah IKM tahun (n-1)/Jumlah IKM	1,25 %	1,25 %		0,69 %	-1,05%		55 %	-184%	
2	SASARAN : Meningkatkan pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	{{volume usaha perdagangan tahun n – volume usaha tahun (n-1))/ volume usaha tahun (n-1)} x 100 %	1,25%	1,5%	1,75%	7,5	-36,3		600	-2.520	
3	SASARAN : Meningkatkan pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	{{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun n – Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok	5 %	7,5 %	10 %	6,14	4,78		122,8	95,6	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			RASIO CAPAIAN		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ilegal) tahun (n-1)) / Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1))) x 100 %									
4	SASARAN : Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan nilai produksi Industri	{{(Jumlah nilai produksi Industri tahun n – Jumlah nilai produksi Industri tahun (n- 1))/ Jumlah nilai produksi Industry tahun (n-1}} x 100 %	0,35%	0,4%	0,45%	4,4	-4,19		1.257,1	-1.147,5	

Tabel 2.3.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016 - 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggar an	Realisa si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	152.198.500	141.303.500		140.617.750	8.900.000	198.771.500	122.870.000		205.885.000	8.900.000	130,6	87,0	-	146,4	100,0	-33,8	1,1
Pendapatan Asli Daerah	152.198.500	141.303.500		140.617.750	8.900.000	198.771.500	122.870.000		205.885.000	8.900.000	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Pajak Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0	130,6	87,0	-	100,0	100,0	-33,8	-6,1
- Hasil Retribusi Daerah	152.198.500	141.303.500		140.617.750	8.900.000	198.771.500	122.870.000		140.617.750	8.900.000	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggar an	Realisa si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- Hasil Pengelolaan Kekayaan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain PAD yang Sah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Umum	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Khusus	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan Hibah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Darurat	0	0		0	0	0	0		0	0	102,6	95,9	-	67,3	80,4	21,9	-5,6
BELANJA DAERAH	4.150.746.279	5.155.051.961		7.359.883.413	7.260.100.807	4.258.143.039	4.943.703.900		4.949.816.401	5.837.644.025	112,1	94,9	-	97,7	97,0	11,1	-4,4
Belanja tidak langsung	1.438.579.979	1.976.509.161		1.823.885.599	1.887.542.259	1.612.817.534	1.874.764.992		1.781.208.841	1.831.191.128	108,9	95,0	-	95,8	97,1	7,4	-3,5
- Belanja Pegawai	1.772.488.579	2.531.072.911		2.031.367.599	2.012.406.259	1.929.629.534	2.403.554.492		1.946.464.841	1.953.157.128	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bunga	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bantuan Sosial	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bagi Hasil Kepada provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	0	0		0	0	0	0		0	0	97,5	96,6	-	57,2	81,4	29,5	0,1
Belanja Langsung	2.712.166.300	3.178.542.800		5.535.997.814	5.372.558.548	2.645.325.505	3.068.938.908		3.168.607.560	4.371.691.897	108,9	95,0	-	95,8	97,1	7,4	-3,5
- Belanja Pegawai	1.772.488.579	2.531.072.911		2.031.367.599	2.012.406.258	1.929.629.534	2.403.554.492		1.946.464.841	1.953.157.128	97,9	96,8	-	55,3	72,6	34,8	-4,2

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- Belanja Barang dan Jasa	2.342.197.050	2.595.938.150		5.177.507.314	4.874.036.230	2.292.709.905	2.512.408.508		2.861.835.560	3.540.022.997	99,3	98,9	-	93,7	92,2	187,9	-2,4
- Belanja Modal	36.060.650	28.040.900		151.008.500	373.658.318	35.803.600	27.740.900		141.516.000	344.463.900	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	-	-	-	-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Pencairan Dana Cadangan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Piutang Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan											-	-	-	-	-	-	-
- Pembentukan Dana Cadangan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Pembayaran Pokok Utang	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Pemberian Pinjaman Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0							
Total	4.302.944.779	5.296.355.461	0	7.500.501.163	7.269.000.807	4.456.914.539	5.066.573.900	0	5.155.701.401	5.846.544.025	130,6	87,0	-	146,4	100,0	-33,8	1,1

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas

II.4.1 Kelemahan dan Kekuatan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi Struktur Organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan diantaranya :

1. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
2. Kurangnya perencanaan, evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan yang ada;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan baik di sektor perindustrian maupun perdagangan;

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar diantaranya :

1. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas ;
2. Jumlah sumber daya manusia aparatur cukup memadai;
3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
4. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan kegiatan Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
5. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya ;
6. Adanya skala prioritas dalam program kerja;
7. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II.4.2 Peluang dan Tantangan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang

(Opportunities) dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan diantaranya :

1. Tersedianya peluang usaha
2. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada sektor perdagangan dan industri;
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai
4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima

Selain itu analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (treaths) Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Blitar diantaranya :

1. Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
2. Sering terdapatnya perubahan produk hukum nasional
3. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi
4. Kebutuhan akan pelayanan di sektor Perdagangan dan Perindustrian yang lebih cepat, baik dan lebih murah sebagai perwujudan Good Governance.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II secara rinci tentang gambaran pelayanan Perangkat Daerah, yang di dalamnya menjelaskan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Namun dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di BAB II, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar di masa mendatang, sebagai berikut

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Disperindag Kota Blitar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Volume perdagangan besar dan eceran perlu ditingkatkan Pengelolaan pasar rakyat/tradisional dan PKL belum optimal Komoditi potensi ekspor di Kota Blitar masih minim Sarana dan prasarana tera/ tera ulang belum lengkap	Metode pemasaran barang berbasis digital belum optimal Peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas belum optimal Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri belum optimal Pengawasan perdagangan belum optimal Penataan dan penempatan pedagang dan relokasi PKL belum optimal Kurangnya pendampingan produk potensi ekspor Masih kurangnya jumlah alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) bertanda tera sah
2	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian	Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih belum optimal Nilai produksi IKM kurang bersaing dengan luar Kota Blitar Perencanaan dan fasilitasi kegiatan industri masih belum optimal	Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku IKM belum optimal (mutu, legalitas usaha, HaKI, pengemasan dan pemasaran/promosi). Kurangnya pengelolaan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah Belum terkelola Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Pelaku IKM masih kesulitan dalam peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi	Belum adanya pendampingan digital marketing Belum disusunnya Rencana RIPK

Berbagai kendala atau permasalahan tersebut memberi informasi hal-hal yang telah dilalui oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun terakhir. Sebagian kendala atau permasalahan tersebut telah dapat ditanggulangi namun masih ada yang memerlukan upaya besar untuk penyelesaiannya sampai dengan saat ini. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar di masa mendatang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah "KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat". Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu "Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup".

Kota Blitar memiliki program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Sapta Program Prioritas sekaligus memuat Program Unggulan Inovatif yang mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah dan kontekstual berdasarkan perkembangan sosial yang semakin dinamis. Pembangunan dan pelayanan publik diharapkan semakin responsif dan tepat sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan. Dalam Hal ini yang Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengemban Program Blitar Makmur.

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3: Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

- Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengemban salah satu misi yaitu misi ke tiga: “Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital”.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Perdagangan RI 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, Kementerian Perdagangan RI memiliki Visi "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dan memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan

3.3.2. Renstra Kementerian Perindustrian RI 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil

Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dan memiliki 9 (sembilan) misi dalam membangun sektor perindustrian dimana misi ini mengadopsi dari 9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 13 sasaran strategis dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Adapun sasaran strategis tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri;
4. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri;
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
6. Meningkatkan Persebaran Industri;
7. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif;
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian;
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas;
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan
13. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

3.3.3 Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Misi ke-1 Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 adalah “Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah”. Misi pertama ini memuat tujuan “Meningkatnya

Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah”, yang diukur dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini”. Sasaran dari indikator tujuan ini adalah :

1. Meningkatkan Nilai Tambah Produksi;
 2. Meningkatkan Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;
- Dari tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Disperindag Provinsi Jatim, yaitu :
1. Meningkatkan PDRB sektori industri pengolahan;
 2. Meningkatkan PDRB sektor Perdagangan;
 3. Meningkatkan net-ekspor perdagangan luar negeri;
 4. Meningkatkan net-ekspor perdagangan dalam negeri;
 5. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
 6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kawasan industri belum membentuk suatu kawasan yang utuh. Lokasi industri cenderung mengelompok pada lingkungan perumahan dengan kerajinan hasil produksi yang serupa seperti kerajinan tangan, pengolahan pangan dan sebagainya. Luas kawasan industri Kota Blitar mencapai 10,19 Ha. Jumlah unit usaha industri pada tahun 2021 sebanyak 4.793 unit usaha industri, terdiri dari industri formal sebanyak 166 dan industri non formal 4.627 unit usaha. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebesar 13.744 orang, dimana 5.185 orang berada pada industri formal dan 8.589 orang pada industri non formal. Jumlah nilai investasinya sebesar Rp. 84.770.188.000,00.

Dari rencana tata ruang wilayah hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar fokus pada pembinaan yang diarahkan kepada para pelaku usaha yang bergerak di bidang industri kerajinan maupun makanan dan minuman yang merupakan komoditi andalan di Kota Blitar.

3.4.1. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD

Dalam mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Pada prinsipnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan selalu sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis, karena dalam Penataan Tempat Dinas Perindustrian dan Perdagangan selalu berdasar rekomendasi dari Pemerintah Daerah, dan atau melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi pada lokasi yang sama, demikian pula dalam hal pembangunan fasilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3.4.2 Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Dalam Implementasi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), dan di antara isu-isu tersebut yang relevan

dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, yaitu :

1. Perlu penataan PKL
2. Pengembangan ekonomi belum maksimal
3. Angka Kemiskinan terancam naik

Isu strategis di pilar ekonomi mencapai 4 (empat) yaitu tekanan perkembangan kota, kondisi infrastruktur kota, pengembangan ekonomi lokal dan penurunan pengangguran. Tekanan perkembangan perkotaan dicerminkan oleh indikator persentase rumah tangga perkumuhan perkotaan. Akses air minum, sanitasi, listrik dan transportasi umum terkait dengan isu peningkatan infrastruktur. Indikator kunjungan wisata dan UMKM menggambarkan isu pengembangan ekonomi lokal di Kota Blitar. Persentase pengangguran dan tingkat setengah pengangguran terkait dengan isu penurunan pengangguran. keterkaitan isu strategis dengan indikator TPB Pilar Ekonomi yang relevan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yaitu isu strategis pengembangan ekonomi lokal, dengan indikator :

1. Laju pertumbuhan PDB per kapita
2. PDB per kapita
3. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita
4. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur
5. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri
6. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit

Dan untuk isu strategis penurunan pengangguran, dengan indicator Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Merujuk isu strategis Kota Blitar pada RPJMD Kota Blitar 2021-2026, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, yaitu :

Peningkatan Kota Blitar sebagai kota layanan perdagangan dan jasa

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Blitar didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Informasi dan Komunikasi; Industri Pengolahan dan Konstruksi. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang paling besar berkontribusi bagi perekonomian Kota Blitar. Pada tahun 2019, kontribusi kategori ini mencapai 1,68 triliun rupiah atau sekitar 24,66 persen. Dari nilai tersebut, sekitar 88,20% merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan 11,80% merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Selama tahun 2019, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor serta Informasi dan Komunikasi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki potensi yang besar pada sektor perdagangan dan perlu tetap dikembangkan pada masa datang. Selain perdagangan, sektor lain yang potensial dikembangkan adalah jasa. Data Tahun 2019 mencatat kontribusi

Jasa Keuangan dan Asuransi adalah 10,56%, Jasa Perusahaan sebesar 0,78%, dan Jasa lainnya 4,69%.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya di tentukan isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Pertumbuhan sektor perdagangan
2. Peningkatan mutu dan daya saing IKM Kota Blitar

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

A. TUJUAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, sebagai berikut :

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor Perindustrian dan perdagangan”

Dengan indikator tujuan : Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB dan Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan dengan indikator Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
2. Meningkatnya produktivitas industri dengan indikator Persentase peningkatan nilai produksi Industri

Secara keseluruhan berikut tabel linieritas tujuan dan sasaran serta Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian		Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun n	%	23,55	24,7	24,75	24,8	24,9	29	128,15
			Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sector industry pengolahan pada tahun n	%	9,75	9,79	9,83	9,87	9,91	9,95	49,35
		Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	[(Volume Usaha Perdagangan tahun n - Volume Usaha Perdagangan tahun (n-1))/ Volume Usaha Perdagangan tahun (n-1)] x 100 %	%	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	11,5
		Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	[(Produktivitas industri tahun n - Produktivitas industri tahun (n-1)) / produktivitas	%	-3,17	0,75	1	1,5	2	2,5	7,75

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Kondisi Akhir
						2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	
				industry tahun (n-1)] x 100%								
	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (82,8)	A (80)	A (81)	A (81,5)	A (82)	A (82)	A (82)

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kota Blitar. Adapun Strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran
2. Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)

4.2 Kebijakan

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kebijakan tersebut adalah :

1. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas
2. Optimalisasi pengawasan perdagangan
3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
4. Peningkatan pemasaran hasil industri
5. Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas
			Optimalisasi pengawasan perdagangan
	Meningkatnya produktivitas Industri	Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)	Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
			Peningkatan pemasaran hasil industri
			Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2021-2026, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

2 SASARAN	5 PROGRAM	14 KEGIATAN	32 SUB KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

2 SASARAN	5 PROGRAM	14 KEGIATAN	32 SUB KEGIATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
Meningkatnya produktivitas Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kota Blitar Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian			Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun n	%	23,55	24,75			
	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan		Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	[(Volume Usaha Perdagangan tahun n - Volume Usaha Perdagangan tahun (n-1))/ Volume Usaha Perdagangan tahun (n-1)] x 100 %	%	1,5	1,75			
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	{Jumlah sarpras perdagangan dalam kondisi baik/ Jumlah sarpras perdagangan yang ada} x 100 %	%	66	69	5.863.964.550	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kota Blitar
			Persentase usaha yang memperoleh pengembangan kapasitas	{(Jumlah usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas/ jumlah usaha yang ada)} x 100 %	%	4,40	4,75			
		Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	{Jumlah bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik/ Jumlah bangunan pasar rakyat yang ada} x 100 %	%	67	70	4.928.678.450		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi	Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi pada tahun n	unit	7	4	4.928.678.450		
			Jumlah Tenaga keamanan pasar yang tersedia	Jumlah Tenaga keamanan pasar yang tersedia pada tahun n	orang	50	50			
			Jumlah Tenaga Kebersihan pasar yang tersedia	Jumlah Tenaga kebersihan pasar yang tersedia pada tahun n	orang	30	30			
			jumlah pedagang pasar rakyat yang dibina	jumlah pedagang pasar rakyat yang dibina pada tahun n	pedagang	200	500			
		Keg.Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Usaha Perdagangan yang dibina	Jumlah Usaha Perdagangan yang dibina tahun n	Unit usaha perdagang an	300	525	935.286.100		
		Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	Jumlah usaha perdagangan yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan pada tahun n	Unit usaha perdagang an	300	500	470.288.000		
			Jumlah pedagang yang mendapatkan fasilitasi promosi perdagangan	Jumlah pedagang yang mendapatkan fasilitas promosi perdagangan pada tahun n	Unit usaha perdagang an		25			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah usaha perdagangan yang didata	Jumlah usaha perdagangan yang didata pada tahun n	Unit usaha perdagang an	1866	2200			
		Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina pada tahun n	pedagang	100	500	464.998.100		
			Jumlah PKL yang didata	Jumlah PKL yang didata pada tahun n	pedagang	1800	1820			
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	(Jumlah hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan / Jumlah hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang ada) x 100%	%	100	100	177.202.700	Program Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian	
		Keg. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Perdagangan pada tahun n	laporan	12	12	177.202.700		
		Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Jumlah Publikasi Informasi harga dan bahan pokok	Jumlah publikasi informasi harga bahan pokok pada tahun n	publikasi	890	700	177.202.700		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
			Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol pada tahun n	orang	200	210			
			Jumlah laporan monev/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol)	Jumlah laporan monev/operasi pengawasan peredaran minol pada tahun n	laporan	-	2			
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	(Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah / Jumlah Alat UTTP yang ada) x 100%	%	1,19	35	576.037.200	Program Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian	
		Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun n	Unit	111	5500	576.037.200		
		Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera ulang pada tahun n	unit	111	5500	250.387.900		
		Sub Keg. Pengawasan/Penyuluh an Metrologi Legal	Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	Jumlah alat UTTP yang didata pada tahun n	orang	50	300	325.649.300		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah alat UTTP yang didata	Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi pada tahun n	unit	9317	7000			
			Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi pada tahun n	unit	650	750			
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian			Kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sector industry pengolahan pada tahun n	%	9,71	9,79			
	Meningkatnya produktivitas Industri		Persentase peningkatan produktivitas industri		%	-3,17	0,75			
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	{{Jumlah IKM tahun n - Jumlah IKM tahun (n-1)}/Jumlah IKM tahun (n-1}} x 100 %	%	1,25	2	2.034.872.780	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kota Blitar
		Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pada tahun n	Unit usaha industri	140	155	2.034.872.780		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Industri Kecil yang dilatih	Jumlah industri kecil yang dilatih pada tahun n	Unit usaha industri	40	125	371.011.680		
			Jumlah monev pelatihan yang dilaksanakan	Jumlah monev pelatihan yang dilaksanakan pada tahun n	laporan	-	1			
			Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitasi HAKI	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitasi HAKI pada tahun n	laporan	-	20			
			Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitasi PIRT	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitasi PIRT pada tahun n		-	10			
		Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peningkatan industri kecil	(Industri kecil tahun n – Industrtri kecil tahun (n-1)) x 100 %	Unit usaha	-51	11	1.663.861.100		
			Jumlah unit usaha yang terfasilitasi mengikuti pameran produk industri daerah	jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah pada tahun n	Unit usaha industri	80	80			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah pengunjung pameran yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	Jumlah pengunjung pameran yang menyatakan berminat untuk bekerjasama pada tahun n	orang	15	11			
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n		82,8	80	6.754.002.483	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kota Blitar
		Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar tahun n / jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang harus disusun tahun n) x 100 %	%	100	100	16.341.800		
		Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun tahun n	dokumen	9	10	8.923.300		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah tahun n	dokumen	4	8	7.418.500		
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar tahun n /jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani tahun n) x 100 %	%	100	100	5.816.910.833		
		Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan tahun n	pegawai	60	58	5.811.726.833		
		Sub Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran) tahun n	laporan	3	4	5.184.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar tahun n /jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani tahun n) x 100 %	%	100	100	200.000.000		
		Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah tahun n	publikasi	14	10	200.000.000		
			Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti tahun n	event	3	3			
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang ketentuan Cukai	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang ketentuan Cukai tahun n	orang	-	135			
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar tahun n / jumlah administrasi umum perangkat daerah yang harus disediakan tahun n) x 100 %	%	100	100	377.287.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia tahun n	komponen	8	11	11.094.800		
		Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi i	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi tahun n	macam	3	3	66.061.600		
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi tahun n	macam	2	2			
		Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia tahun n	jenis	25	31	44.723.000		
		Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia tahun n	Dos	1000	700	99.353.600		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia tahun n	Macam	46	25			
			Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia tahun n	porsi	200	350			
		Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia tahun n	cetakan	13	7	38.124.000		
			Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan tahun n	lembar	53600	15000			
		Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia tahun n	Bahan bacaan	36	36	7.440.000		
		Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti tahun n	Rakor	30	50	110.490.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar tahun n / jumlah jasa penunjang urusan yang harus disediakan tahun n) x 100 %	%	100	100	174.107.850		
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan tahun n	rekening	108	132	174.107.850		
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar tahun n / jumlah BMD yang harus dipelihara tahun n) x 100 %	%	100	100	169.355.000		
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara tahun n	Unit	11	3	90.179.300		
			Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dandibayarkan Perizinannya tahun n	Unit	16	16			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara tahun n	Macam	3	4	15.550.500		
		Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor yang terpelihara tahun n	unit	1	1	40.100.000		
		Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara tahun n	macam	5	4	23.525.200		

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kota Blitar Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANAA N	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp					
1	2	4	5	6	7	8	13	Rp 14	15	16	17	Rp 18	19	20	21	22	22	23
MENINGKAT KAN PERTUMBU HAN EKONOMI SEKTOR PERDAGAN GAN DAN PERINDUST RIAN			Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun n	%	23,55	24, 8		24, 85		24, 9		29		29			
	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan		Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	[(Volume Usaha Perdagangan tahun n - Volume Usaha Perdagangan tahun (n-1))/ Volume Usaha Perdagangan tahun (n-1)] x 100 %	%	1,5	2		2,2 5		2,5		3		3			
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	{Jumlah sarpras perdagangan dalam kondisi baik/ Jumlah sarpras perdagangan yang ada} x 100 %	%	67	70, 5	38.267.316.800	72	32.656.432.000	73, 5	32.716.886.000	75	6.146.480.300	75	109.787.115.100	Dinas Perind ustria n dan perda ganga n	Kot a Blit ar
		Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	{Jumlah bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik/ Jumlah bangunan pasar rakyat yang ada} x 100 %	%	67	70	28.750.000.000	80	31.625.000.000	80	31.625.000.000	90	5.000.000.000	90	92.005.000.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANAA N	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
		Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi Perdagangan pada tahun n	unit	7	8	14.375.000.000	8	15.812.500.000	8	15.812.500.000	9	2.500.000.000	33	48.500.000.000		
		Sub Keg.Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada tahun n	unit	8	7	14.375.000.000	9	15.812.500.000	9	15.812.500.000	7	2.500.000.000	32	48.500.000.000		
		Keg.Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	(Jumlah usaha perdgangan yang dibina / jumlah usaha perdagangan) x 100%	%	4	5	9.517.316.800	6	1.031.432.000	6	1.091.886.000	6	1.146.480.300	6	12.787.115.100		
		Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan pada tahun n	dokume n	4	4	4.758.658.400	4	515.716.000	4	545.943.000	4	603.058.050	16	6.423.375.450		
		Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan pada tahun n	dokume n	3	3	4.758.658.400	4	515.716.000	4	545.943.000	4	543.422.250	15	6.363.739.650		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANAA N	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	Rp	K Rp	K Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	(Jumlah hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan / Jumlah hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang ada) x 100%	%	100	100	250.000.000	100	275.000.000	100	291.500.000	100	306.075.000	100	1.122.575.000	Dinas Perind ustria n dan Perda ganga n	
		Keg.Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah Kab/Kota	Persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	(Jumlah barang penting yang diawasi / jumlah barang penting yang harus diawasi) x 100%	%	100	100	85.000.000	100	90.000.000	100	90.500.000	100	102.075.000	100	367.575.000		
		Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah hasil koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat pada tahun n	laporan	2	2	85.000.000	2	90.000.000	2	90.500.000	2	102.075.000	8	367.575.000		
		Keg. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	(jumlah harga dan stok barang yang diawasi / jumlah harga dan stok barang yang harus diawasi) x 100%	%	100	100	105.000.000	100	110.000.000	100	110.500.000	100	102.000.000	100	427.500.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANAA N	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
		Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah hasil dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pada tahun n	laporan	3	3	105.000.000	3	110.000.000	3	110.500.000	3	102.000.000	12	427.500.000		
		Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	(Jumlah pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi / jumlah pedagang pupuk dan pestisida yang ada) x 100%	%	100	100	60.000.000	100	75.000.000	100	90.500.000	100	102.000.000	100	327.500.000		
		Sub.Keg. Pengawasan pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah hasil pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	laporan	3	2	60.000.000	2	75.000.000	2	90.500.000	2	102.000.000	8	327.500.000		
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	(Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah / Jumlah Alat UTTP yang ada) x 100%	%	1,19	40	6.633.675.000	45	669.525.000	50	709.696.500	55	745.181.325	55	8.758.077.825	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun n	unit	111	5700	6.633.675.000	5800	669.525.000	6000	709.696.500	6000	745.181.325	23500	8.758.077.825		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANAA N	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp				
1	2	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
		Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera ulang pada tahun n	unit	111	550 0	3.316.837.50 0	580 0	275.450.000	590 0	291.977.000	600 0	306.575.850	23200	4.190.840.350		
		Sub Keg. Pengawasan/Pen yuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina pada tahun n	orang	50	300	3.316.837.50 0	300	394.075.000	300	417.719.500	300	438.605.475	1.200	4.567.237.47 5		
MENINGKAT KAN PERTUMBU HAN EKONOMI SEKTOR PERDAGAN DAN PERINDUST RIAN			Kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sector industry pengolahan pada tahun n	%	9,71	9,8 3		9,8 7		9,9 1		9,9 5		9,95			
	Meningkatnya produktivitas Industri		Persentase peningkatan nilai produksi Industri	{{Jumlah nilai produksi Industri tahun n – Jumlah nilai produksi Industri tahun (n-1)}/ Jumlah nilai produksi Industry tahun (n-1)} x 100 %	%	-3,17	1		1,5		2		2,5		2,5			
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	{{Jumlah IKM tahun n - Jumlah IKM tahun (n-1)}/Jumlah IKM tahun (n-1)} x 100 %	%	1,25	2,5	2.200.000.000	3,5	2.310.000.000	5	2.430.225.000	6	2.551.736.250	6	9.491.961.250		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANAA N	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp					
1	2	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
		Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	(Jumlah IKM yang dibina / Jumlah IKM) x 100%	%	4	5	2.200.000.000	5	2.310.000.000	5	2.430.225.000	6	2.551.736.250	6	9.491.961.250		
		Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri pada tahun n	dokume n	4	3	988.878.503	4	472.500.000	4	500.850.000	4	525.892.500	15	2.488.121.003		
		Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada tahun n	dokume n	5	4	1.017.813.869	5	1.610.500.000	5	1.600.375.000	5	1.600.843.750	19	5.829.532.619		
		Sub.Keg.Evalua si Pelaksanaan rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industry pada tahun n	dokume n	5	6	193.307.628	6	227.000.000	5	329.000.000	5	425.000.000	22	1.174.307.628		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANAA N	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp					
1	2	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n	%	82,8	80, 5	7.673.304.788	81	8.386.854.094	81, 5	9.108.329.988	82	9.968.761.527	82	35.137.250.397	Sekret ariat	
		Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar tahun n / jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang harus disusun tahun n) x 100 %	%	100	100	17.320.000	100	18.369.200	100	18.973.000	100	20.660.700	100	75.822.900		
		Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun tahun n	dokume n	9	10	9.450.000	10	10.027.000	10	10.628.000	10	11.285.000	40	41.390.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANAA N	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
		Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada tahun n	laporan	4	8	7.870.000	8	8.342.200	8	8.345.000	8	9.375.700	32	34.432.900		
		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar tahun n /jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani tahun n) x 100 %	%	100	100	6.689.188.258	100	7.358.109.444	100	7.593.520.388	100	8.503.312.427	100	31.044.530.517		
		Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN pada Tahun berjalan	orang	60	58	6.683.485.858	60	7.351.834.444	60	7.586.617.888	60	8.495.719.677	60	31.018.057.867		
		Sub Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /triwulanan/sem esteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwula nan/semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semestera n SKPD pada tahun berjalan	laporan	3	4	5.702.400	4	6.275.000	4	6.502.500	4	7.592.750	16	26.472.650		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANA N	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar tahun n /jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani tahun n) x 100 %	%	100	100	210.000.000	100	220.500.000	100	231.525.000	100	243.101.250	100	905.126.250		
		Sub keg Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan pada tahun berjalan	paket	4	5	78.300.000	5	89.300.000	5	98.500.000	5	143.101.000	20	409.201.000		
		Sub keg Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan	orang	300	300	131.700.000	300	131.200.000	300	133.025.000	300	100.000.250	300	495.925.250		
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar tahun n / jumlah administrasi umum perangkat daerah yang harus disediakan tahun n) x 100 %	%	100	100	396.152.530	100	415.933.700	100	436.733.600	100	458.675.250	100	1.707.495.080		
		Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	8	11	11.650.000	11	12.235.000	11	12.850.000	11	13.492.500	44	50.227.500		
		Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	3	3	69.364.680	3	72.835.000	4	76.476.750	4	80.400.000	14	299.076.430		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANAAN	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
		Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	paket	5	6	46.959.150	6	49.308.000	7	51.773.400	6	54.362.000	25	202.402.550		
		Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	10	15	104.322.000	15	109.538.100	15	115.015.000	15	120.765.750	60	449.640.850		
		Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan pada tahun berjalan	paket	4	5	40.030.200	5	42.000.000	6	44.100.000	5	46.305.000	21	172.435.200		
		Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan pada tahun berjalan	dokume n	24	36	7.812.000	36	8.202.600	36	8.612.700	36	9.050.000	144	33.677.300		
		Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	10	12	116.014.500	15	121.815.000	15	127.905.750	20	134.300.000	62	500.035.250		
		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD sesuai standar	(Jumlah BMD yang tersedia sesuai standart/Jumlah BMD yang harus disediakan)x 100%	%		100	156.791.000	100	172.470.100	100	300.900.000	100	400.000.000	100	1.030.161.100		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANAA N	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp					
1	2	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
		Sub Keg.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit		1	156.791.000	1	172.470.100	1	300.900.000	1	400.000.000	4	1.030.161.100		
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standart / Jumlah penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan) x 100%	%	100	100	182.820.000	100	191.961.000	100	401.600.000	100	211.680.000	100	788.061.000		
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	laporan	48	48	91.410.000	48	95.980.500	48	201.600.000	48	105.840.000	192	394.830.500		
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan		24	91.410.000	24	95.980.500	24	200.000.000	24	105.840.000	96	394.830.500		
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar tahun n / jumlah BMD yang harus dipelihara tahun n) x 100 %	%	100	100	177.824.000	100	181.980.750	100	125.078.000	100	131.331.900	100	616.214.650		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANAAN	TARGET KINERA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERA PD PENA NGGU NGAW AB	LOK ASI
							2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannyaterpelihara pada tahun berjalan	unit	11	13	94.689.000	15	94.689.000	13	33.424.000	12	35.095.200	12	257.897.200		
		Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara pada tahun berjalan	unit	3	4	16.328.000	4	17.144.400	4	18.000.000	4	18.900.000	16	70.372.400		
		Sub Keg. Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab ilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	1	42.105.000	1	44.210.250	1	46.420.000	1	48.741.000	4	181.476.250		
		Sub Keg. Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direh abilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	5	5	24.702.000	4	25.937.100	5	27.234.000	4	28.595.700	18	106.468.800		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET					Kondis i Kinerj a pada Akhir Th. 2021
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10
1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	23,55	24,7	24,75	24,8	24,85	24,9	11,5 %
2	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustria n terhadap PDRB	%	9,71	9,75	9,79	9,83	9,87	9,91	9,95

Sedangkan indikator kinerja Utama yang ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021-2026

N O	INDIKATOR UTAMA DISPERDAGIN	SATUA N	KONDI SI KINERJ A PADA AWAL PERIO DE RPJMD 2020	TARGET					Kondis i Kinerja Pada Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	23,55	24,7	24,75	24,8	24,85	24,9	25
2	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	9,71	9,75	9,79	9,83	9,87	9,91	9,91

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang memuat kerangka kerja Tahunan Pemerintah Kota Blitar menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Adapun keberhasilan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sangat tergantung pada kejujuran tekad dan semangat kerja. Transparansi dan inovasi serta komitmen dari pimpinan beserta seluruh staf di jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dikalangan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk melaksanakan program dalam Rencana Strategis secara murni dan konsekuen.
3. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas program.
4. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien agar dapat dicapai hasil kinerja yang optimal.
5. Perubahan Renstra ini digunakan sebagai Acuan Rencana Kerja Tahunan (Renja), RKA dan DPA serta digunakan untuk dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
6. Jika ada perubahan SOTK maka dilakukan perubahan Renstra yang berpedoman Peraturan Walikota.